

Perbandingan kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi aceh

Muhammad Zulkarnain^{1*}, Yulina Astuti², Krisniawati³, Mukarramah⁴

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Pase Langsa.

⁴Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sumatera Utara

¹Email: m.zulkarnain28@gmail.com

²Email: yulina.astuti.ya@gmail.com

³Email: krisniawati2892@gmail.com

⁴Email: mukarramah144@gmail.com

Abstrak

Kinerja pemerintah terus menjadi perhatian publik hingga saat ini, karena berhubungan dengan kondisi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pemerintah secara umum dapat diketahui dari kinerja keuangannya baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan atau perbedaan kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Kinerja keuangan yang diteliti yaitu rasio kemandirian dan rasio efektivitas. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Aceh tahun 2014-2018. Metode analisis data menggunakan uji t independent sampel test. Hasil penelitian diketahui rasio kemandirian untuk kabupten dan kota di Provinsi Aceh secara keseluruhan belum mandiri atau masih sangat rendah. Kemudian rasio efektivitas untuk kabupaten dan kota di provinsi Aceh sudah efektif. Hasil uji beda untuk rasio kemandirian diperoleh nilai p value (sig 2-tailed) $> \alpha$ 5% atau $0,119 > 0,05$ dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan kemandirian antara kabupaten dan kota di Provinsi Aceh selama tahun 2014-2018. Hasil uji beda untuk rasio efektivitas nilai p value (sig 2-tailed) $> \alpha$ 5% atau $0,675 > 0,05$ dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara kabupaten dan kota di Provinsi Aceh selama tahun 2014-2018.

Kata Kunci: Kinerja keuangan; rasio kemandirian; efektivitas

Comparative analysis of district/city financial performance in aceh province

Abstract

The performance of the government continues to be a public concern to date, because it is related to the financial condition and welfare of the community. The performance of the government in general can be known from its financial performance at the provincial, district and city levels. This research was conducted with the aim to find out the comparison or differences in financial performance of districts and cities in Aceh Province. The financial performance studied is the ratio of independence and effectiveness ratio. The data used are secondary data in the form of reports on the realization of district and city budgets in Aceh Province in 2014-2018. The data analysis method uses independent sample t test. The results of the study found that the ratio of independence for the regencies and cities in Aceh Province as a whole was not yet independent or was still very low. Then the effectiveness ratio for districts and cities in Aceh province has been effective. Different test results for the ratio of independence obtained p value (sig 2-tailed) $> \alpha$ 5% or $0.119 > 0.05$ can be stated there is no difference in independence between districts and cities in Aceh Province during 2014-2018. Different test results for the effectiveness ratio of the p value (sig 2-tailed) $> \alpha$ 5% or $0.675 > 0.05$ can be stated there is no difference in the level of effectiveness between districts and cities in Aceh Province during 2014-2018.

Keywords: *Financial performance; independence ratio; effectiveness*

PENDAHULUAN

Bergulirnya era otonomi daerah yang dicanangkan tahun 1999 dan berlaku sejak terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberlakuan diharapkan akan terciptanya kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara desentralisasi yang semula adalah sentralisasi. Pengelolaan keuangan daerah ini juga diharapkan akan terjadi pembangunan yang lebih baik di setiap daerah karena daerah-daerah lebih mengetahui prioritas pembangunan di daerahnya. Pembangunan yang baik nantinya akan berdampak pada kondisi daerah yang semakin maju dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh akan digunakan untuk belanja daerah selanjutnya sehingga pemerintah pusat tidak perlu lagi untuk memberikan bantuan belanja pembangunan daerah melalui transfer pusat berupa Dana Perimbangan. Tetapi pada kenyataannya setiap daerah sampai saat ini baik Kabupaten maupun Kota masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan Pendapatan Asli Daerah masing-masing Kabupaten/Kota masih sangat rendah sementara untuk belanja daerah nilainya lebih besar, sehingga pemerintah daerah Kabupaten/Kota masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah masih ada yang belum efektif dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, yang mana masih terdapat lebih besar anggaran daripada realisasinya.

Masih tingginya ketergantungan daerah-daerah terhadap pemerintah pusat dan belum efektifnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah juga terjadi perbedaan antara setiap daerah terutama Kabupaten dan Kota. Perbedaan terjadi karena adanya daerah yang luas dan kepadatan penduduknya serta besar kecilnya sumber Pendapatan Asli Daerah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Asri, 2016) diketahui bahwa terdapat perbedaan kemandirian daerah dimana pemerintah kota lebih tinggi rasio kemandiriannya dibandingkan dengan pemerintah kabupaten.

Provinsi Aceh yang memiliki 23 pemerintah daerah yang terdiri dari 18 Pemerintah Kabupaten dan 5 Pemerintah Kota. Dari 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh secara umum masih memiliki tergantung pada pemerintah pusat, (Zulkarnain, 2017). Kemudian tingkat efektivitas masih terdapat pemerintah kabupaten dan kota dengan tingkat efektivitas sangat efektif dan adapula yang kurang efektif (Zulkarnain, 2017). Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2014-2018 pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Pendapatan Asli Daerah dan Total Penerimaan masih sangat terpaut jauh. Artinya setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih bergantung pada transfer pemerintah pusat untuk membelanjai daerah. Hal tersebut dapat diketahui dari rata-rata Pendapatan Asli Daerah dan total pendapatan pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tabel berikut.

Tabel 1: Rata-rata pendapatan asli daerah dan total pendapatan kabupaten/kota di provinsi aceh tahun 2014-2018 (dalam rupiah)

Kabupaten/kota	Rata-rata target pad	Rata-rata realisasi pad	Rata-rata total pendapatan
Kab. Aceh Barat	120.607.851.949	139.063.788.724	1.196.048.903.008
Kab. Aceh Besar	102.552.118.042	135.244.213.548	1.580.959.733.248
Kab. Aceh Selatan	101.524.434.587	94.188.165.335	1.310.515.803.451
Kab. Aceh Singkil	42.829.462.198	35.971.389.909	799.533.977.368
Kab. Aceh Tengah	142.476.048.817	151.980.935.490	1.341.950.432.628
Kab. Aceh Tenggara	63.974.686.625	51.355.555.884	1.194.296.622.030
Kab. Aceh Timur	114.670.568.338	120.290.384.016	1.619.755.215.917
Kab. Aceh Utara	225.812.956.601	205.433.974.160	2.114.771.474.780
Kab. Bireun	171.364.441.160	180.970.738.697	1.737.979.297.523
Kab. Pidie	230.190.942.066	226.280.003.177	1.839.469.820.846
Kab. Simeulue	37.294.131.352	50.756.458.465	814.578.831.845
Kota Banda Aceh	211.463.823.872	205.528.735.270	1.184.924.636.334
Kota Sabang	46.452.665.739	50.474.364.995	595.701.536.752
Kota Langsa	109.896.535.151	117.222.139.894	870.188.272.892
Kota Lhokseumawe	58.160.422.416	58.048.906.391	832.819.065.168
Kab. Gayo Lues	37.081.663.870	45.132.388.418	917.377.921.543

Kabupaten/kota	Rata-rata target pad	Rata-rata realisasi pad	Rata-rata total pendapatan
Kab. Aceh Barat Daya	71.352.446.146	75.022.312.474	907.715.055.544
Kab. Aceh Jaya	44.452.102.375	46.758.256.928	852.515.625.060
Kab. Nagan Raya	86.727.067.766	84.097.737.100	1.037.715.699.280
Kab. Aceh Tamiang	111.306.418.487	113.477.586.736	1.160.240.328.556
Kab. Bener Meriah	73.642.059.698	62.836.294.630	888.918.768.582
Kab. Pidie Jaya	45.358.433.340	42.330.208.402	950.453.541.695
Kota Subulussalam	41.165.024.887	39.261.743.640	654.655.856.562

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dari rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah masih terlalu kecil jumlahnya dibandingkan dengan rata-rata total pendapatan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Pendapatan Asli Daerah masing-masing kabupaten/ kota di provinsi Aceh masih terlalu kecil dalam membelanjai daerah, sehingga peranan pemerintah pusat masih besar dalam membantu belanja setiap daerah. Kemudian bila dilihat antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah masih terdapat daerah-daerah terlalu besar target dibandingkan realisasinya, hal ini berdampak pada tingkat efektivitas dimana lebih besar target dibandingkan realisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.

Tinjauan pustaka

Kinerja keuangan

Kinerja keuangan akan memberikan kemudahan untuk perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan yang sustainable (Soeharjoto, 2019). Pengukuran kinerja keuangan penting dalam menilai akuntabilitas organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik, (Ropa, 2016). Sementara pendapat dari (Zafra, Gomez; Luis, Jose; Hernandez, 2009) menyatakan bahwa penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan data anggaran, informasi ekonomi, maupun informasi keuangan. Kinerja keuangan merupakan alat ukur yang baik dalam menilai kinerja manajemen pemerintah lokal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui analisis laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.

Kemudian (Mahmudi, 2010) mengemukakan bahwa kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk dapat memberikan gambaran kinerja keuangan. Secara umum pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah berguna untuk mengetahui tingkat kesehatan struktur keuangan, dan tingkat kemandirian suatu daerah dengan melihat kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan daerah dibanding dengan kewajiban pemerintah dalam membiayai belanja daerah. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. (Mulyadi, 2004) membagi ukuran kinerja menjadi dua, yaitu ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja non keuangan. Kinerja keuangan biasanya diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat yaitu dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Di pihak lain, kinerja non-keuangan dapat dilihat dari kualitas pelayanan, kedisiplinan, kepuasan pelanggan dan sebagainya.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) maksimal dengan menggunakan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Budiarto, 2007). Kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan berupa realisasi, neraca dan laporan arus kas. Laporan keuangan dapat dianalisis dengan memberikan gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah seperti untuk mengetahui tingkat kemandirian suatu daerah dengan tingkat

efektivitasnya. Sedangkan Menurut Halim, (Zulkarnain, Astuti, & Wiriani, 2019) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia..

Analisis rasio keuangan

Menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk: (1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; (2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; (3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; (4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; dan (5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2007). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya, namun terdapat beberapa rasio yang dapat dikembangkan, antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, serta Debt Service Coverage Ratio (DSCR), (Halim, 2007).

METODE

Objek penelitian adalah kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Waktu untuk menyelesaikan penelitian ini selama bulan Juli sampai Agustus 2019. Kemudian variabel penelitian berupa kinerja keuangan terdiri dari rasio kemandirian dan efektivitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2014-2018, diperoleh melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Analisis data menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas keuangan daerah. Untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah dengan formula (Halim, 2007):

Rasio kemandirian keuangan daerah = $PAD / \text{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$

Kemudian untuk rasio efektivitas dengan formula:

Rasio efektivitas = $\text{realisasi penerimaan PAD} / \text{Target penerimaan PAD} \times 100\%$

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan dilakukan analisis data uji beda. Menurut (Ghozali, 2009), uji beda t test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel atau lebih yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Kriteria pengambilan keputusan:

Jika nilai sig (2 tailed) < α 5% maka terdapat perbedaan kedua kelompok data

Jika nilai sig (2 tailed) > α 5% maka tidak terdapat perbedaan kedua kelompok data

Sebelum dilakukan uji beda, dilakukan terlebih dahulu asumsi yang harus dipenuhi independent samples test terdiri skala data interval/rasio, kelompok data saling bebas, data per kelompok tidak berdistribusi normal dan varians antar kelompok sama atau homogen. Uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan pengambilan keputusan adalah:

Jika sig > α 5% maka data berdistribusi normal

Jika sig < α 5% maka data tidak berdistribusi normal

Uji homogenitas dengan menggunakan test of homogeneity of variance dan pengambilan keputusan adalah:

Jika sig > α 5% maka terdapat kesamaan varians antar kelompok atau homogen

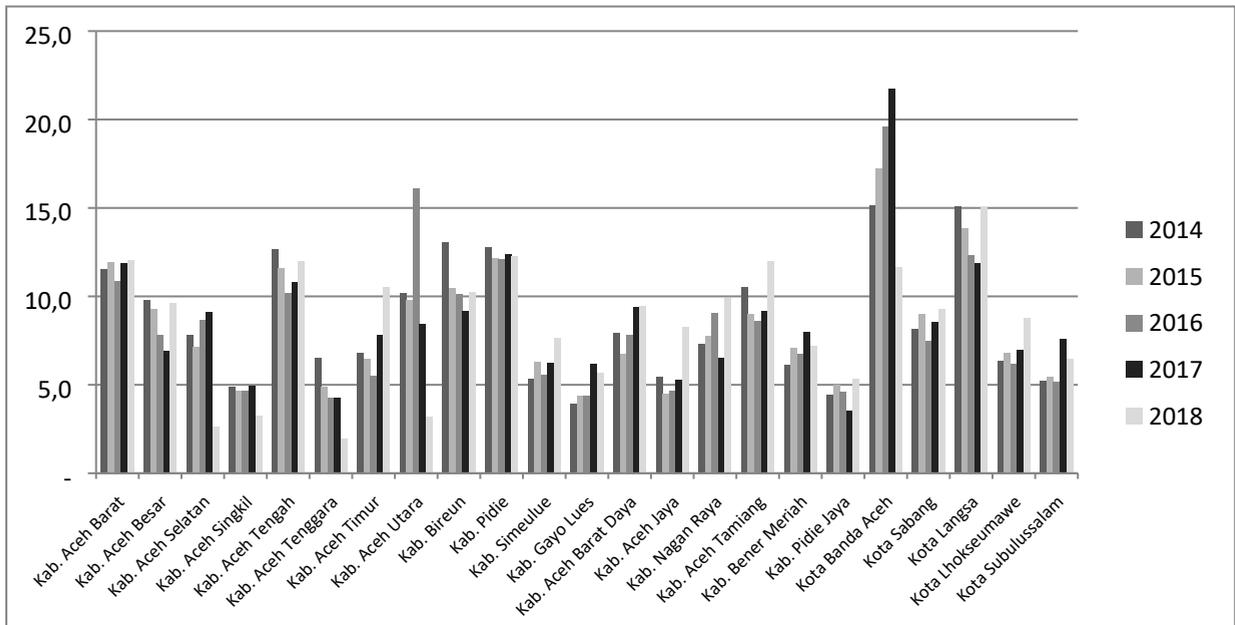
Jika sig < α 5% maka tidak terdapat kesamaan varians antar kelompok atau homogen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diakses dari halaman web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang menggunakan data dari 18 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Aceh. Data tersebut merupakan data time series dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh diketahui bahwa semua daerah kabupaten dan kota masih belum mandiri dengan hasil perhitungan

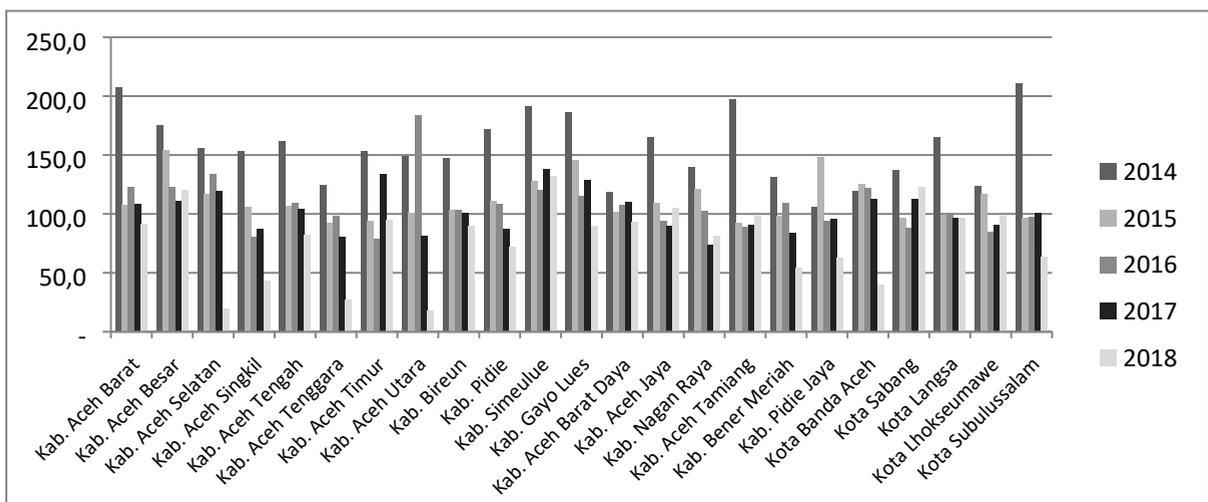
kategori rendah sekali. Hasil hitung rasio ini memberikan gambaran kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Berikut dapat dilihat rata-rata rasio kemandirian daerah kabupaten dan kota diprovinsi aceh.



Gambar 1. Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di provinsi aceh tahun 2014-2018

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2014-2018 secara umum masih di bawah 25%. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kabupaten dan kota di Provinsi Aceh belum mandiri. Dari grafik tersebut juga diketahui walaupun belum mandiri akan tetapi terdapat daerah yang memiliki rasio kemandirian tertinggi yaitu Kota Banda Aceh dan diikuti dengan Kota Langsa. Kemudian yang memiliki rasio kemandirian terendah adalah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Simeulue, Gayo Lues, Aceh Jaya, dan Pidie Jaya.

Sementara untuk kinerja keuangan berdasarkan tingkat efektivitas dapat diketahui bahwa antara target atau anggaran Pendapatan Asli Daerah sudah banyak yang efektivitas akan tetapi masih terdapat yang belum efektif yaitu daerah yang masih terlalu besar target Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan realisasinya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Rasio efektivitas daerah kabupaten/kota di provinsi aceh tahun 2014-2018

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas dilihat dari target atau anggaran dengan realisasi. Secara umum sudah mencapai lebih dari 100% atau efektif akan tetapi masih terdapat beberapa daerah yang apabila dirata-ratakan dari tahun 2014-2018 belum efektif seperti Kabupaten Aceh Singkil hanya ditahun 2014 dan 2015 yang efektif. Sementara Kabupaten Aceh Tenggara yang efektif hanya di tahun 2014 dan Kabupaten Bener Meriah yang efektif hanya di tahun 2014, tahun 2016 sementara bila dirata-ratakan dari tahun 2014-2018 belum efektif. hal tersebut karena ketiga daerah masih lebih besar target atau anggaran dibandingkan dengan realiasi Pendapatan Asli Daerah. Bagi daerah yang efektif dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dapat dikarenakan prestasi pemerintah kabupaten dan kota dalam merelasisasikan anggarannya serta adanya potensi daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.

Analisis uji normalitas dan homogenitas data kelompok

Sebelum melakukan uji beda maka dilakukan uji normalitas data kelompok, dimana pada penelitian ini kelompok data dibagi menjadi dua yaitu kelompok kabupaten dengan kategori 1 dan kota dengan kategori 2. Uji normalitas dilakukan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil uji asumsi normalitas data kelompok
 one-sample kolmogorov-smirnov test

		Kemandirian	Efektivitas
N		23	23
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	8,4435	111,0391
	Std. Deviation	3,22135	13,39304
Most Extreme Differences	Absolute	,120	,242
	Positive	,120	,242
	Negative	-,105	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z		,578	1,158
Asymp. Sig. (2-tailed)		,892	,137

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan pada tabel 2 dapat diketahui Kolmogorov-Smirnov dengan hasil uji Asymp. Sig. (2-tailed) > α 5%. Untuk tingkat kemandirian Asymp. Sig. > 0,05 (0,892 > 0,05) dapat dinyatakan data kemandirian berdistribusi normal. Kemudian efektivitas Asymp. Sig. > 0,05 (0,137 > 0,05) dapat dinyatakan data efektivitas berdistribusi normal. Selanjutnya uji asumsi homogenitas.

Tabel 3. Hasil uji asumsi homogenitas data kelompok
 test of homogeneity of variance

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Kemandirian	,433	1	21	,518
Efektivitas	1,915	1	21	,177

Hasil uji homogenitas pada tabel 3 dapat diketahui untuk kemandirian nilai p value (sig) > α 5% atau 0,518 > 0,05 dapat dinyatakan maka terdapat kesamaan varians antar kelompok atau homogenya. Untuk efektivitas nilai p value (sig) > α 5% atau 0,518 > 0,05 dapat dinyatakan maka terdapat kesamaan varians antar kelompok atau homogenya.

Analisis uji beda kinerja keuangan berdasarkan kemandirian dan efektivitas

Perbandingan kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian dan rasio efektivitas dapat diketahui dari uji beda. Uji beda rasio kemandirian dan rasio efektivitas yang membandingkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Aceh. Uji beda dilakukan dengan uji t independent samples test. Hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil uji t kemandirian kelompok

	Kelompok	N	Mean	Std Deviation	Std. Error Mean
Kemandirian	1	18	7,8889	2,58022	,60816
	2	5	10,4400	4,73424	2,11722

Independent samples test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Differen ce	Std. Error Differen ce	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
Kemandirian	Equal variances assumed	6,092	,022	-1,624	21	,119	-2,55111	1,57108	-5,81836	,71613
	Equal variances not assumed			-1,158	4,680	,302	-2,55111	2,20283	-8,33220	3,22998

Hasil uji t independen t test pada tabel 4 dapat diketahui untuk nilai p value (sig 2-tailed) > α 5% atau 0,119 > 0,05 dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan kemandirian antara kabupaten dan kota di Provinsi Aceh selama tahun 2014-2018. Hal tersebut karena kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

Uji beda dengan uji t independent samples test pada rasio efektivitas dan hasilnya:

Tabel 5. Hasil uji t efektivitas kelompok

	Kelompok	N	Mean	Std Deviation	Std. Error Mean
Kemandirian	1	18	111,6778	14,97306	3,52918
	2	5	108,7400	5,02921	2,24913

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Differen ce	Std. Error Differen ce	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
Kemandirian	Equal variances assumed	1,947	,177	,426	21	,675	2,93778	6,90013	-11,4118	17,28738
	Equal variances not assumed			,702	19,760	,491	2,93778	4,18494	-5,79865	11,67421

Hasil uji t independen t test pada tabel 4 dapat diketahui untuk nilai p value (sig 2-tailed) > α 5% atau 0,675 > 0,05 dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara kabupaten dan kota di Provinsi Aceh selama tahun 2014-2018. Hal tersebut karena kabupaten dan kota di Provinsi Aceh untuk rasio efektivitas secara umum berada di atas 100% atau efektivitas, hal ini karena tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah masih lebih tinggi dibandingkan dengan target atau yang telah dianggarkan. Selain itu kinerja pemerintah daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah sudah baik dengan memanfaatkan potensi daerah masing-masing.

SIMPULAN

Kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah untuk kabupaten dan kota di Provinsi Aceh secara keseluruhan masih sangat rendah atau masih dibawah 25%. Akan tetapi ditingkat kemandirian yang masih sangat rendah terdapat yang sudah mendekati ke 25% yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh. Kemudian kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio efektivitas untuk kabupaten dan kota di Provinsi Aceh secara umum sudah efektif karena sudah berada diatas 100%. Hanya tiga daerah yang belum efektif yaitu Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Bener Meriah. Hasil uji t menunjukkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian tidak terdapat perbedaannya antara kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Hal tersebut karena setiap daerah masih memiliki Pendapatan Asli Daerah

yang terlalu kecil sehingga masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Kemudian kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas tidak terdapat perbedaannya antara kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Hal tersebut karena setiap daerah merealisasikan Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, J. D. (2016). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 1021–1034.
- Budiarto, B. (2007). Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Ekonomi Daerah Surabaya.
- Ghozali, Ii. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Kedua. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kementrian Keuangan. 2019. Realisasi APBD. Di ambil dari: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. (31 September 2019)
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Kedu). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyadi. (2004). Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat & Rekayasa. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *EMBA*, 4(2).
- Soeharjoto, S. (2019). Kemampuan dan Kinerja Keuangan Provinsi Kalimantan. *Akuntabel*, 15(2), 131–138.
- Zafra, Gomez; Luis, Jose; Hernandez, A. M. L. (2009). Evaluating Financial Performance in Local Gverment: Maximing the Benchmarking Values. *International Riview of Administrative Sciences*.
- Zulkarnain, M. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Alokasi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh. Universitas Sumatera Utara.
- Zulkarnain, M., Astuti, Y., & Wiriani, E. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 65–73. Retrieved from <https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/1289/1035>